

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Melly Anggraini

NPM : 19752044

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Efisiensi Kinerja BKKBN Tahun 2017-2019

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tugas Akhir/Artikel Ilmiah ini berdasarkan hasil penulisan, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan tugas akhir maupun data yang tercantum dalam tugas akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber dengan jelas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila dikemudian hari terdapat hasil plagiarism dari pihak lain, kekeliruan, penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab saya secara pribadi dan saya akan melepaskan seluruh tuntutan terhadap Politeknik Negeri Lampung dan Para Pembimbing yang namanya tercantum dalam Tugas Akhir atau Artikel Ilmiah ini. Dan saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan

Melly Anggraini



BKKBN menggunakan dana yang cukup besar, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2017-2018 BKKBN dikatakan efisien dan 2019 dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah. Dibuktikan dengan kriteria efisiensi yang diungkapkan oleh Mahmudi (2019) bahwa persentase efisiensi 75-90% digolongkan kedalam tingkat efisien, 90-99% digolongkan kedalam tingkat cukup efisien, 100% kurang efisien, dan >100% tidak efisien.

Menurut kriteria Mahmudi (2019), belanja pegawai tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh presentase berturut-turut sebesar 85,15%, 79,13% dan 94,60% dengan kata lain belanja pegawai mengalami penurunan 6,02% pada tahun 2018 dan kenaikan 15,47% pada tahun 2019 sehingga termasuk kriteria efektif pada tahun 2017 dan 2018, serta cukup efektif pada tahun 2019. Belanja barang tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh presentase berturut-turut sebesar 80,38%, 74,93% dan 89,73% dengan kata lain belanja barang mengalami penurunan 5,45% pada tahun 2018 dan kenaikan 14,8% pada tahun 2019 sehingga termasuk kriteria efektif pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Belanja modal tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh presentase berturut-turut sebesar 91,11%, 84,74% dan 93,51% dengan kata lain belanja modal mengalami penurunan 6,37% pada tahun 2018 dan kenaikan 8,77% pada tahun 2019 sehingga termasuk kriteria efektif pada tahun 2018, serta cukup efektif pada tahun 2017 dan 2018.

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA UNTUK MENILAI EFISIENSI KINERJA BKKBN TAHUN 2017-2019

Melly Anggraini¹⁾, Nurmala²⁾, Arif Makhsun³⁾

Mahasiswa, pembimbing 1, pembimbing 2

mellyanggraini2001@gmail.com, nurmala@polinela.ac.id, mas_arif@polinela.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja untuk menilai efisiensi kinerja BKKBN. Dengan menggunakan metode kuantitatif, melibatkan tahun 2017-2019, penelitian saat ini menggunakan data yang diperoleh melalui website resmi BKKBN. Metode kuantitatif adalah informasi dalam bentuk jumlah yang didasarkan pada hasil perhitungan maupun hasil pengukuran dalam bentuk angka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BKKBN tahun 2017 dan 2018 efisien serta tahun 2019 dinyatakan cukup efisien.

Kata Kunci: *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah saat ini merupakan bidang akuntansi yang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana publik yang dikuasai pemerintah telah meningkatkan kebutuhan akan penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah (Nordawan, Putra, & Rahmawati, 2012). Menurut Heldawati (2021), kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan prinsip efisiensi. Salah satu alat manajemen yang digunakan sebagai ukuran efisiensi adalah anggaran. Menurut Sujarweni (2019), anggaran merupakan tanggung jawab pemilik pimpinan organisasi untuk menyelenggarakan dan memberikan informasi kepada publik tentang segala kegiatan dan kegiatan organisasi kepada pemilik organisasi dan mengimplementasikannya dalam bentuk program.

Sebuah proyek yang didanai publik. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa tahap penganggaran sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat mengganggu rencana yang

disiapkan.

Bastian (2010) menyatakan bahwa masyarakat dapat menuntut pemerintahan yang bersih atau memberikan informasi yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Anggaran yang dikelola oleh organisasi sektor publik harus menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pelaporan keuangan sektor publik adalah indikator kinerja keuangan badan publik. Pelaporan keuangan sektor publik memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan mendanai kegiatan mereka dan memenuhi kebutuhan likuiditas mereka, dan membantu menilai kemampuan mereka untuk mendanai kegiatan mereka untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka perusahaan. Ini juga memberikan informasi berkelanjutan untuk membantu Anda mengevaluasi kinerja perusahaan Anda dalam hal biaya layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Laporan realisasi anggaran (LRA) diperlukan untuk mengukur tingkat efisiensi dan fungsinya untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Makhsun dan Rusmianto (2008) menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

MELLY ANGGRAINI: Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Efisiensi Kinerja BKKBN Tahun 2017-2019 [AKUNTANSI]

adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, pengeluaran dan pendanaan selama periode waktu tertentu. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan kepatuhan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan gambaran tentang sumber pendanaan, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah selama periode laporan meningkat. Laporan keuangan pemerintah LRA memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor. secara tersanding dalam satu periode laporan. Ruliaty, Badollahi dan Nurfadilah (2019) menjelaskan bahwa LRA perlu dianalisis karena berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran.

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) adalah salah satu kementerian/lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan terutama pada Agenda Prioritas Nomor 5 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Indonesia" melalui "Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana". BKKBN basis kas untuk penyusunan dan penyajian LRA. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Alasan penulis mengambil laporan di BKKBN Pusat karena di lokasi Praktek Kerja Lapang (PKL) tepatnya di kantor Dinas Pertanian Lampung Utara tidak diperoleh

untuk mengambil data yang diperlukan oleh penulis untuk membuat laporan Tugas Akhir. Sehingga, penulis berinisiatif untuk mencari data yang terbuka di website resmi khususnya di sektor pemerintahan agar data yang diambil hampir sama yang ada di PKL. Untuk data laporan BKKBN Pusat ini memiliki data yang terbuka seperti beberapa data yang bisa diambil melalui website resmi BKKBN Pusat. Contohnya, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Aset/BMN, dan Laporan Keuangan Audited/CALK. Akan tetapi, untuk data yang bisa diperoleh di BKKBN Pusat ini hanya sampai periode 2019. Sehingga, penulis hanya bisa menganalisis tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja sampai dengan tahun 2019.

Kinerja keuangan BKKBN dapat dicapai melalui aspek efisiensi. Menurut Bastian (2010) efisiensi adalah penilaian kinerja organisasi yang berkaitan dengan input. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Kriteria tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2019) sebagai berikut: Tidak efisien >100%, Kurang efisien 100%, Cukup efisien 90%-99%, Efisien 75%-89%, Sangat efisien <75%. Presentase efisiensi dapat dihasilkan dari pembagian realisasi belanja dibagi dengan anggaran belanja, belanja dalam BKKBN dibedakan menjadi 3 yaitu, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai

MELLY ANGGRAINI: Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Efisiensi Kinerja BKKBN Tahun 2017-2019 [AKUNTANSI]

honorar yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Efisiensi sering dipertimbangkan sebagai faktor pengubah kebijakan organisasi sektor publik. Dalam analisis efisiensi terfokus dalam hal belanja yang dianggarkan oleh BKKBN dan realisasinya. Hal ini disebabkan karena BKKBN tidak membuat anggaran pendapatan karena pendapatan pada LRA diakui pada saat kas diterima pada kas umum negara (KUN).

Analisis efisiensi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun anggaran belanja untuk tahun selanjutnya, agar dana yang dianggarkan tidak terdapat selisih yang signifikan dengan realisasinya. Dari

permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam tugas akhir yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja untuk Menilai Efisiensi Kinerja BKKBN Tahun 2017-2019”.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu

Tugas akhir dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan September 2022, bertempat di kampus Politeknik Negeri Lampung yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta No. 10, Kota Bandar Lampung.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan untuk penyusunan laporan tugas akhir ini adalah laporan realisasi anggaran BKKBN tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yaitu data sekunder. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pemberi data yang berupa bukti, catatan atau dokumen historis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi adalah catatan atas peristiwa yang terjadi di masa lalu. Data diperoleh melalui website resmi BKKBN.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode kuantitatif adalah informasi dalam bentuk jumlah yang didasarkan pada hasil perhitungan maupun hasil pengukuran dalam bentuk angka. Adapun rumus yang digunakan dalam menganalisis efisiensi anggaran dan realisasi belanja yang sesuai dengan Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisa Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tahap-tahap analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terkait anggaran dan realisasi anggaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
2. Menghitung tingkat efisiensi anggaran dan realisasi belanja sesuai dengan rumus Mahmudi (2019).
3. Menganalisis efisiensi anggaran dan realisasi belanja sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak efisien : >100%
 - b. Kurang efisien : 100%
 - c. Cukup efisien : 90%-99%
 - d. Efisien : 75%-89%
 - e. Sangat efisien : <75%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi umum perusahaan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah diberdayakan untuk melaksanakan prioritas pembangunan (Nawacita), khususnya prioritas nomor 5, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembangunan kependudukan". Salah satu kementerian/lembaga". Selanjutnya, BKKBN berada dalam Strategi Pembangunan Nasional dalam aspek pembangunan manusia dan berpartisipasi dalam upaya mencapai keberhasilan dalam aspek kesehatan dan pengembangan intelektual/pribadi (revolusi spiritual). Peran keluarga dalam mewujudkan revolusi spiritual.

Hasil dan Pembahasan Perhitungan efisiensi

Perhitungan efisiensi realisasi anggaran belanja pada BKKBN untuk tahun 2017-2019 diperoleh dari data keuangan perusahaan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017 rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi realiasi anggaran belanja sebagai berikut:

MELLY ANGGRAINI: Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Efisiensi Kinerja BKKBN Tahun 2017-2019 [AKUNTANSI]

Tahun 2017:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp}2.232.151.958.930}{\text{Rp}2.740.081.067.000} \\ \times 100\% & \\ &= 81,46 \end{aligned}$$

Tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp}4.298.731.927.178}{\text{Rp}5.574.162.165.000} \\ \times 100\% & \\ &= 77,12\% \end{aligned}$$

Tahun 2019:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{\text{Rp}3.538.241.106.438}{\text{Rp}3.822.821.933.000} \\ \times 100\% & \\ &= 92,56\% \end{aligned}$$

Hasil dan Pembahasan Analisis efisiensi

Perhitungan efisiensi realisasi anggaran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah :

Tahun 2017 menunjukkan bahwa kinerja BKKBN berada di presentase 81,46% sehingga dikatakan efisien sesuai kriteria mahmudi (2019), tahun 2018 menunjukkan bahwa kinerja BKKBN berada dipresentase 77,12% dimana lebih kecil dari pada presentase sebelumnya sehingga dalam presentase mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi masih dalam kategori efisien dan tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja BKKBN berada di presentase 92,56% dimana lebih besar dari pada presentase sebelumnya sehingga masuk dalam kriteria cukup

efisien. Pada tahun 2019 terjadi penurunan tingkat efisiensi dikarenakan BKKBN menggunakan anggaran belanja yang cukup besar dari tahun sebelumnya sehingga terjadi indikasi pemborosan anggaran dan tingkat efisiensi menjadi menurun. Hal ini disebabkan kegiatan program kerja BKKBN menggunakan dana yang cukup besar, sehingga secara keseluruhan dari tahun 2017-2018 BKKBN dikatakan efisien dan 2019 dikatakan cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan daerah. Dibuktikan dengan kriteria efisiensi yang diungkapkan oleh Mahmudi (2019) bahwa persentase efisiensi 75-90% digolongkan kedalam tingkat efisien, 90-99% digolongkan kedalam tingkat cukup efisien, 100% kurang efisien, dan >100% tidak efisien.

Menurut kriteria Mahmudi (2019), belanja pegawai tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh presentase berturut-turut sebesar 85,15%, 79,13% dan 94,60% dengan kata lain belanja pegawai mengalami penurunan 6,02% pada tahun 2018 dan kenaikan 15,47% pada tahun 2019 sehingga termasuk kriteria efektif pada tahun 2017 dan 2018, serta cukup efektif pada tahun 2019. Belanja barang tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh presentase berturut-turut sebesar 80,38%, 74,93% dan 89,73% dengan kata lain belanja barang mengalami penurunan 5,45% pada tahun 2018 dan kenaikan 14,8% pada tahun 2019 sehingga termasuk

MELLY ANGGRAINI: Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Efisiensi Kinerja BKKBN Tahun 2017-2019 [AKUNTANSI]

kriteria efektif pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Belanja modal tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh presentase berturut-turut sebesar 91,11%, 84,74% dan 93,51% dengan kata lain belanja modal mengalami penurunan 6,37% pada tahun 2018 dan kenaikan 8,77% pada tahun 2019 sehingga termasuk kriteria efektif pada tahun 2018, serta cukup efektif pada tahun 2017 dan 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja BKKBN sebagai berikut:

1. Tahun 2017 BKKBN dinyatakan efisien. Karena, tingkat persentase realisasi anggaran belanja hanya sebesar 81,56%.
2. Tahun 2018 persentase efisiensi anggaran belanja mengalami penurunan angka sebesar 77,12%. Artinya di tahun ini juga anggaran belanjanya tetap berada di golongan efisien.
3. Tahun 2019 persentase efisiensi anggaran belanja di angka tertinggi selama tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 92,56%. Sehingga di tahun 2019 ini berada di golongan cukup efisien.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran keuangan 2017-2018 BKKBN dinyatakan efisien. Artinya, BKKBN

mampu mengelola anggaran keuangan daerah dengan baik. Sedangkan untuk di tahun 2019 BKKBN dinyatakan cukup efisien. Artinya, BKKBN dikatakan kurang mampu dalam mengelola anggaran keuangan daerah dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan pengurangan anggaran oleh BKKBN.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas terkait dengan realisasi anggaran belanja BKKBN khususnya tahun 2019, saran untuk pihak BKKBN adalah selalu antisipasi dalam menyusun anggaran keuangannya agar kinerja BKKBN selalu berada pada tingkat efisien.

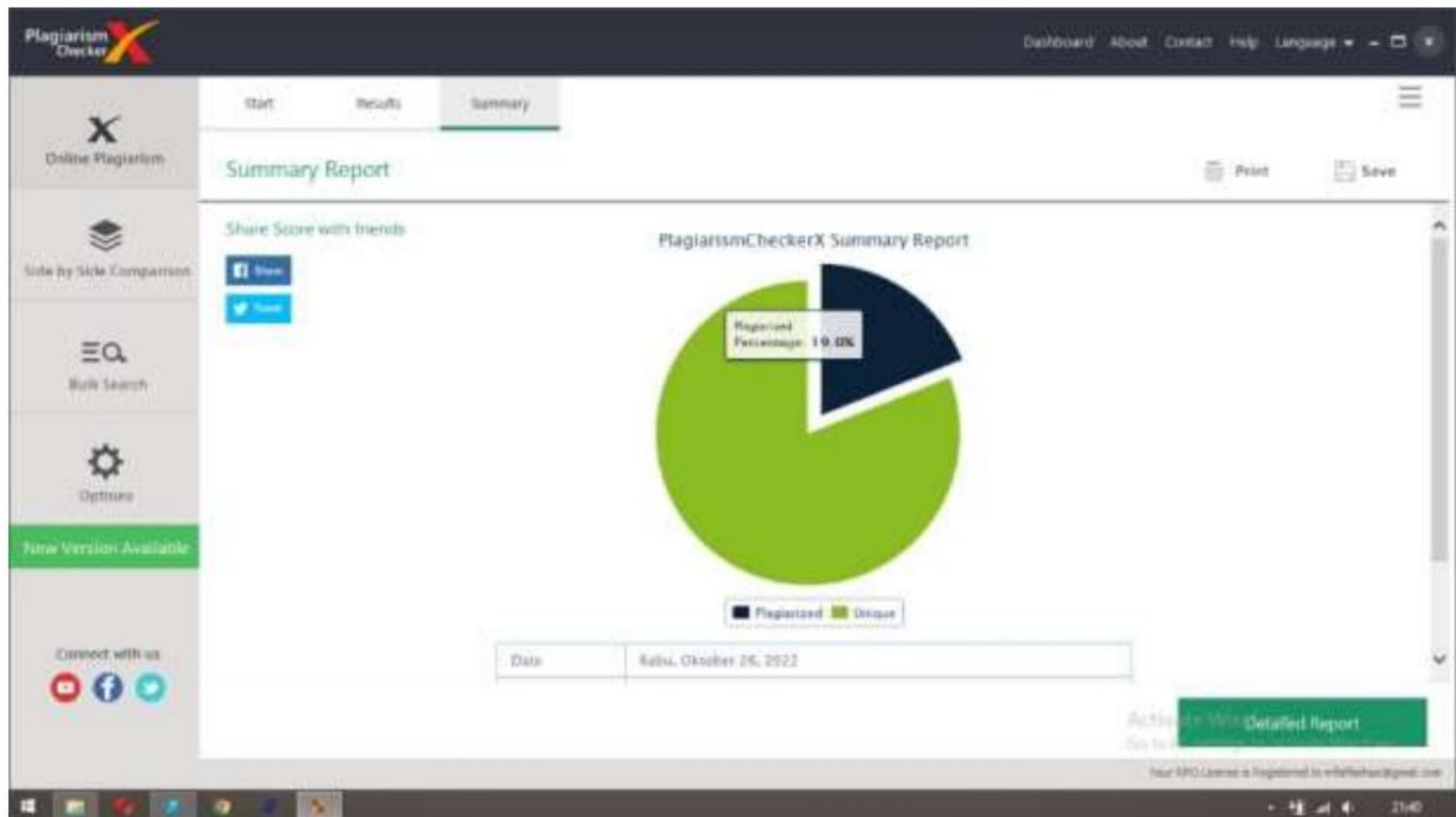
DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- BKKBN. 2022. BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id>
- Heldawati. 2021. Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi.
- Lampung, Politeknik Negeri. 2018. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung.
- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

MELLY ANGGRAINI: Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Menilai Efisiensi Kinerja BKKBN Tahun 2017-2019 [AKUNTANSI]

- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nordiawan, D., Putra, I.S. dan Rahmawati, M. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta. 348 hal.
- Nourmanita, N.A. 2016. Belanja publik (expenditure assignment) antara masalah dan efektivitas anggaran belanja. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. Vol. 4 (1): 31-48.
- Ruliaty, Badollahi, I. dan Nurfadillah, A. I. 2019. Analisis laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone. Jurnal Ekonomi Invoice. Vol 1 (1)
- Rusmianto dan Makhsun, A. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Wineka Media. Malang.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V.W. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

HASIL PENCETAKAN PLAGIARISME



Telah diperiksa dengan layanan pencegahan plagiarisme melalui aplikasi Plagiarism Checker X dengan Keterangan hasil sebagai berikut:

Nama File : Melly Anggraini

Tanggal Pelaksanaan : 26 Oktober 2022

Tingkat plagiatriisme : 19,0%